



Article Informations  
Corresponding Email:  
[harrysubagja1@gmail.com](mailto:harrysubagja1@gmail.com)

Received: 02/08/2024; Accepted:  
23/10/2024; Published: 23/10/2024

## **KEPENTINGAN NASIONAL MAROKO DALAM NORMALISASI HUBUNGAN BILATERAL DENGAN ISRAEL PADA TAHUN 2020**

**Maulana Hari Subagja**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani

### **Abstrak**

Menggambarkan secara umum mengenai kepentingan nasional dari Maroko dalam melakukan normalisasi hubungan Diplomatik dengan Israel. Berdasarkan tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya normalisasi hubungan Diplomatik Maroko dengan Israel, mengkaji kepentingan Maroko dalam normalisasi hubungan Diplomatik dengan Israel dan mengetahui peran Amerika Serikat dalam normalisasi hubungan Maroko dan Israel. Melalui pendekatan neorealisme dan konsep kepentingan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi sengketa wilayah di sahara barat sebagai masalah utama. Dengan adanya kesepakatan normalisasi hubungan antara Maroko dan Israel juga memperkuat posisi Maroko di kawasan khususnya terkait permasalahan Sahara Barat dan Front Polisario.

**Kata Kunci :** Maroko, Israel, Kepentingan Nasional.

### **Abstract**

*Describes in general terms the national interests of Morocco in normalizing diplomatic relations with Israel. Based on the objectives of this study are to determine the factors that encourage the normalization of Moroccan diplomatic relations with Israel, examine Morocco's interests in normalizing diplomatic relations with Israel and determine the role of the United States in normalizing relations between Morocco and Israel. Through the approach of neorealism and the concept of national interest. This research aims to overcome the territorial dispute in the Western Sahara as the main problem. The agreement to normalize relations between Morocco and Israel also strengthens Morocco's position in the region, especially regarding the Western Sahara issue and the Polisario Front.*

**Keywords:** Morocco, Israel, National Interest.

## **PENDAHULUAN**

Pada pertengahan tahun 2020 dinamika politik yang terjadi di Timur Tengah dan Negara Kawasan Arab telah menjadi sorotan dunia. Pasalnya kawasan Timur Tengah yang mayoritas negaranya merupakan negara Islam dan berperan sangat penting dalam menjunjung tinggi solidaritas dan mendukung penuh atas kemerdekaan Palestina dan telah menjalankan hubungan diplomatik dengan Israel untuk melakukan normalisasi. Dimana pada tahun tersebut Israel secara resmi menyepakati normalisasi hubungan diplomatik dengan sebagian negara di Kawasan arab, yaitu Maroko, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan. Kesepakatan normalisasi yang dikenal dengan perjanjian *Abraham Accords*, perjanjian tersebut dimediasi dan disponsori oleh pemerintahan Amerika Serikat. Bagi negara-negara Arab, menjalin kesepakatan dengan Israel merupakan tindakan kontroversi, karena berkaitan dengan historis dan dinamika politik negara-negara Arab yang kontra terhadap Israel, sehingga kesepakatan *Abraham Accords* menuai berbagai respon dan kecaman (Ulum, 2021)

Namun pada 10 Desember 2020 diumumkan bahwa Maroko dan Israel sepakat untuk menormalisasi hubungan melalui mediasi Presiden Trump. Pada tanggal 22 Desember 2020, saat itu Israel mengirim delegasi mereka yaitu Meir Ben-Shabbat sebagai penasehat keamanan nasional dan ditemani perwakilan dari Gedung Putih AS yaitu penasihat senior Jared Kushner mengunjungi ibu kota Maroko, Rabat, dan mengadakan pertemuan dengan Raja Maroko Mohammed VI. Ketiga negara menandatangani deklarasi bersama mengenai normalisasi hubungan Maroko-Israel. Di antara negara-negara Arab, Maroko dinilai memiliki hubungan yang relatif baik dengan Israel.

Dampak dari perjanjian ini Maroko menerima pengakuan AS atas kedaulatannya atas Sahara Barat. Ketika perjanjian normalisasi Maroko-Israel diumumkan pada 10 Desember 2020, Presiden Trump mengumumkan AS telah mengakui atas kedaulatan Maroko di wilayah Sahara Barat, serta niat untuk membuka konsulat di wilayah tersebut. Pendirian konsulat di Sahara Barat Sahara sebagai pos terdepan Kedutaan Besar AS di Maroko menandakan Amerika Serikat menganggap wilayah tersebut sebagai wilayah Maroko (BBC News, 2020).

Maroko mengklaim hak teritorial atas Sahara Barat, bekas jajahan Spanyol, sementara di tingkat lokal, *Front Polisario* telah berkampanye untuk kemerdekaannya. Front Polisario, yang menerima dukungan dari negara tetangga Maroko, Aljazair, mendeklarasikan pembentukan “Republik Demokratik Arab Sahrawi” pada tahun 1976, dan pemerintahan dalam pengasingannya berlokasi di Aljazair. Meskipun Front Polisario hanya menguasai sebagian Sahara Barat, “Republik Demokratik Arab Sahrawi” diakui sebagai sebuah negara oleh banyak negara Afrika dan Amerika Latin dan merupakan anggota penuh Uni Afrika. Selain itu, PBB dan banyak negara Barat mengambil sikap bahwa permasalahan seputar Sahara Barat harus diselesaikan melalui referendum.

Sebaliknya, Deklarasi Bersama Maroko, Amerika Serikat, dan Israel pada tanggal 22 Desember 2020 menyatakan, “Satu-satunya pondasi untuk resolusi yang adil dan berkepanjangan untuk masalah teritorial Sahara Barat adalah proposal otonomi Maroko yang serius, kredibel, dan realistis, yang mana Amerika Serikat menegaskan dukungannya,” yaitu, posisi AS bahwa persoalan Sahara Barat adalah persoalan otonomi dalam negeri Maroko dan bukan persoalan pemisahan diri dan kemerdekaan.

Selanjutnya, Amerika Serikat menyetujui peta baru yang mencakup wilayah Sahara Barat Sahara sebagai wilayah Maroko. Dengan cara seperti itu, Maroko mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Sementara itu, *Front Polisario* dan Aljazair mengecam Amerika Serikat, dan Aljazair memutuskan hubungan dengan Maroko pada tahun berikutnya, 2021 (Trump, 2020). Berdasarkan uraian yang disajikan pada latar belakang diatas, dapat diperoleh rumusan masalah yakni, Mengapa Maroko melakukan normalisasi hubungan bilateral dengan Israel pada tahun 2020?

Dalam jurnal Bachrul Ulum sebagai tinjauan pustaka dari penelitian ini yang berjudul **Pro-Kontra normalisasi hubungan diplomatic Israel-Sudan antara kepentingan nasional dengan solidaritas pembebasan** Palestina mengatakan bahwa normalisasi hubungan yang dilakukan oleh Israel dengan negara arab akan membangun politik '*common enemy*' dalam menghadapi Turki dan Iran. Secara mengejutkan Sudan menjadi negara ketiga yang menyetujui normalisasi hubungan dengan Israel, pasalnya Sudan termasuk salah satu negara yang dengan lantang menolak perlakuan Israel atas Palestina Sudan juga memiliki Identitas islam sufisme yang sangat kuat.

Jurnal ini relevan dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti karena memiliki kesamaan yaitu membahas apa alasan dibalik terjadinya normalisasi antara Israel dengan negara arab. Jurnal ini ditulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis dan konsep kepentingan nasional dalam perumusan kebijakan luar negerinya (Ulum, 2021).

Neorealisme pertama kali diperkenalkan oleh Kenneth N. Waltz sebagai realisme struktural. Richard Ashley kemudian mempopulerkan kata neorealisme dalam bukunya "*The Poverty of*

*Neorealism*". Neorealisme, bersama dengan neoliberalisme, adalah pendekatan yang paling berpengaruh dalam hubungan internasional kontemporer. Berlawanan dengan kaum realis yang memandang kekuasaan sebagai totalitas kekuatan militer, kaum neorealis berpendapat bahwa kekuasaan adalah agregasi seluruh aspek dan sumber daya suatu negara untuk memaksa dan mendominasi negara lain dalam sistem internasional. Menurut kaum neorealis, negara dianggap memiliki kewajiban untuk meningkatkan kemampuan untuk bertahan dalam kondisi anarkis. (Waltz, 1988)

Tokoh lain dalam neorealisme yaitu Stephen M. Walt dalam bukunya yang berjudul *The Origins of Alliances* menjelaskan mengenai konsep *balance of threat*. Menurut Walt, terdapat dua cara bagi negara dalam menghadapi suatu ancaman, yaitu *Balancing* dan *bandwagoning*. *Bandwagoning* yaitu bagaimana negara mendekati diri pada negara yang lebih kuat. Harapannya adalah negara lemah akan mendapat jaminan keamanan dari negara kuat. Dalam *bandwagoning*, semakin kuat negara dan semakin jelas kekuatan tersebut ditunjukkan, maka semakin besar kemungkinan pihak lain untuk bersekutu dengannya. (Waltz S. M., 1987)

Sesuai dengan pandangan neorealisme yang beranggapan bahwa kekuatan suatu negara diukur dari militer dan ekonomi mereka, militer yang besar membuat Israel dan Amerika Serikat termasuk ke dalam negara kuat, sedangkan Maroko dengan militernya dikategorikan sebagai negara lemah. Tindakan Maroko untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel merupakan bentuk upaya Maroko sebagai negara lemah untuk melakukan *bandwagoning* kepada negara kuat, yaitu Israel. Selain itu, normalisasi ini juga menjadi sebuah perantara untuk Maroko

melakukan bandwagoning kepada Amerika Serikat. Maroko melakukan bandwagoning kepada negara kuat karena mereka dihadapi oleh ancaman, yaitu Front Polisario yang beraliansi dengan Aljazair.

### **Konsep Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional dianggap sebagai dasar yang sangat penting bagi negara-negara dalam membentuk hubungan internasional. Kepentingan nasional sangat melekat sekali pada kekuasaan suatu negara, baik sebagai tujuan maupun sebagai alat, dan yang paling penting bersifat destruktif (*hard power*). Selagi kepentingan nasional bersaing agar mendapatkan kekuasaan dan digunakan untuk menegakkan kepentingan nasional, hasilnya dianggap anarki pada struktur internasional.

Kepentingan nasional merupakan konsep analisis hubungan luar negeri yang dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku hubungan luar negeri suatu negara. Menurut K.J. Holsti, kepentingan nasional adalah konsep yang menentukan masa depan negara melalui para pengambil keputusan yang membentuk kebijakan luar negeri. (Holsti, 1987)

Terdapat beberapa penjelasan mengenai kepentingan nasional yaitu dalam hal ini model matriks yang diadaptasi dari James N. Rosenau dan Donald E. Nuechterlein. Menurut Donald E. Nuechterlein kepentingan nasional yaitu kondisi dimana kebutuhan dan keinginan yang dirasakan dari satu negara berdaulat dalam ringkasan dengan negara berdaulat lainnya yang terdiri dari faktor eksternal. Rosenau dan Nuechterlein memberikan definisi mengenai kepentingan nasional, yang menetapkan tingkatan dari kepentingan nasional, dan menyarankan tingkatan prioritas. (Nuechterlein, 1983).

Berdasarkan tujuan penelitian yang bertujuan

untuk memahami gambaran tentang kepentingan nasional Maroko dalam normalisasi hubungan bilateral dengan

Israel pada tahun 2020 maka peneliti memutuskan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki dan memahami pentingnya banyak individu atau kelompok orang dikaitkan dengan masalah sosial atau kemanusiaan. (J, 2007) Pada penelitian ini penulis memilih menggunakan metode penelitian eksplanasi yang mana dalam metode ini digunakan untuk menguji suatu teori atau hipotesis untuk memperkuat ataupun menolak teori atau hipotesis dari hasil sebuah penelitian. Metode ini bersifat menjelaskan mengapa suatu peristiwa dapat terjadi berdasarkan data yang terkumpul yang kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan untuk menjawab suatu rumusan masalah. Tujuan dari penelitian eksplanasi ini untuk menjelaskan hal-hal dibalik sesuatu yang terjadi sehingga mengetahui alasan-alasan mengapa fenomena itu terjadi.

Menurut Sugiyono, Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data (Sugiyono, 2014). Studi pustaka akan dilakukan untuk mengumpulkan data dan berupa fakta yang disimpan sebagai dokumentasi. Ciri utama dari data ini adalah tidak terbatas pada ruang atau waktu, data ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menemukan hal-hal yang pernah terjadi di masa lampau. Teknik ini dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek kajian dan mengharapkan dokumen-dokumen tersebut dapat memberikan dukungan tambahan terhadap informasi yang diperoleh, misalnya kajian terhadap buku, jurnal, dokumen

pemerintah suatu negara, atau media yang mudah diakses, seperti seperti internet.

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan analisis yang bersifat induktif dimana peneliti menemukan fakta ataupun fenomena di lapangan kemudian disatukan menjadi hipotesis ataupun asumsi. Asumsi yang telah dibuat dijadikan sebagai alur pemikiran yang keabsahan datanya akan berkembang atau tetap sesuai dengan fakta ataupun fenomena yang terjadi di lapangan.

Analisis data yang dilakukan dengan mengolah data, menjabarkan ke dalam beberapa unit, membuat pola serta memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari. Peneliti melakukan berbagai cara salah satunya menyusun data-data yang telah dikumpulkan, menggabungkan beberapa data menjadi kalimat yang dijabarkan dalam penelitian ini. (Nasution, 1996).

## **PEMBAHASAN**

Dalam konteks normalisasi hubungan Maroko-Israel yang disponsori oleh Amerika Serikat, telah diketahui bahwa Sahara Barat menjadi isu sentral pada kesepakatan tersebut. Proses negosiasi menuju normalisasi yang melibatkan isu Sahara Barat telah berlangsung dua tahun sebelum normalisasi terjadi. Penasihat senior sekaligus menantu Trump, Jared Kushner, bersama dengan utusan khusus Gedung Putih Avi Berkowitz telah berkomunikasi sejak tahun 2018 dengan pemerintah Maroko terkait kemungkinan normalisasi hubungan Maroko-Israel dengan pengakuan AS terhadap Sahara Barat sebagai imbalannya (Paksi, 2022)

Maroko dan Israel setuju untuk menormalisasi hubungan dalam kesepakatan yang ditengahi dengan bantuan AS pada



bulan Desember. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, AS mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, wilayah sengketa yang diklaim oleh Rabat dan front Polisario yang didukung Aljazair. Maroko beranggapan langkah tersebut bukan normalisasi, melainkan dimulainya kembali hubungan resmi yang dimulai pada 1993 tetapi dihentikan pada 2000 (welle, 2020).

Terdapat beberapa penjelasan mengenai kepentingan nasional menurut Donald E, Nuechterlein, kepentingan nasional dipakai mendeskripsikan, menjelaskan atau mengevaluasi kebijakan luar negeri yang digunakan sebagai instrumen tindakan politik. Donald E, Nuechterlein memiliki empat kepentingan nasional yang menjadi dasar untuk *Defense Of Homeland* (mempertahankan tanah air), *Economic Well-being* (kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi), *Favorable World Order* (tatanan dunia yang menguntungkan) dan *Promotion Of Values* (berdasarkan ideology/sejarah).

### ***Defense Of Homeland***

Salah satu upaya Maroko untuk mengembalikan wilayah sahara barat kembali ke Maroko Kerjasama dengan negara-negara super power seperti Amerika dan Prancis untuk mengimbangi pergerakan Sahara Barat yang disuplai persenjataan oleh Libya dan Aljazair. Dalam bidang pertahanan atau militer, kerjasama dengan Israel memberikan manfaat penting bagi militer Maroko, yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kemampuan militernya melalui akses ke teknologi Israel, terutama UAV, atau pesawat tanpa awak. Maroko semakin memandang kerja sama militer dengan Israel sebagai langkah pencegahan terjadinya agresi yang diinisiasi oleh Front Polisario dan Aljazair, kedua pihak yang dipersepsikan sebagai ancaman bagi keamanan Maroko. Selain itu juga kerjasama dengan Amerika Serikat dan Israel juga akan memudahkan akses Maroko terhadap peralatan militer seperti

pesawat tempur dan alat lainnya dari negara-negara sekutu-sekutu Amerika Serikat yang dimana Alutsista ini tentu akan semakin memperkuat posisi Maroko di kawasan khususnya dalam kaitan konflik sahara barat (Adwitama, 2022).

Israel memberikan manfaat tambahan bagi militer yang ingin meningkatkan kemampuannya. Akses Maroko ke teknologi Israel, khususnya kendaraan udara tak berawak (UAV), memungkinkannya melompati kemajuan dalam meningkatkan kekuatan militernya. Penggunaan teknologi UAV tidak diatur secara global, dengan drone sudah tersedia dari mitra yang tepat (Israel, Turki, dll.), dan harganya relatif murah. Laporan media tentang akuisisi terbaru Maroko menggambarkan pembelian ambisius yang berfokus pada teknologi drone.

Terjalannya hubungan yang baik pasca normalisasi hubungan dengan Israel dan juga Amerika Serikat tentu akan mempermudah akses Maroko dalam mengakuisisi berbagai alutsista yang dapat memiliki efek deteren di kawasan khususnya terhadap tetangga yang sering terlibat selisih seperti Aljazair. Hal ini dapat terlihat dari pengeluaran militer Maroko juga terus meningkat. Kedua negara memiliki pengeluaran militer per kapita tertinggi di bagian dunia mereka: Aljazair adalah yang kedua dan Maroko berada di urutan kelima. Hal ini sejalan dengan pola yang lebih luas dari peningkatan pengeluaran militer di seluruh Timur Tengah, tetapi implikasinya terhadap lingkungan mereka sendiri perlu dicermati. Pilihan untuk membelanjakan lebih banyak pada persenjataan dan sekuritisasi umum yang berlebihan seringkali datang dengan mengorbankan kebutuhan anggaran yang lebih mendesak, seperti pemberian layanan, khususnya perawatan kesehatan, infrastruktur, dan Pendidikan (Fakir, 2022)

### ***Economic Well-Being***

Dalam konteks ini, Maroko melakukan penyederhanaan prosedur perdagangan luar negeri, pengurangan proteksi tarif, penghapusan tindakan non tarif, perbaikan lingkungan bisnis dan investasi, perluasan dan diversifikasi hubungan ekonomi dan perdagangan, dan terakhir, regulasi kontribusi untuk mengkonsolidasikan sistem perdagangan multilateral. Pembukaan ini lebih lanjut diilustrasikan dengan penandatanganan berbagai perjanjian perdagangan bebas oleh Kerajaan dengan mitra ekonomi utamanya, termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat, dan di negara-negara Arab dan Afrika. Selain itu, seperangkat teks hukum diberlakukan atau dimodifikasi untuk mendukung reformasi tersebut. Ini termasuk, misalnya Piagam Investasi, Undang-undang Dagang, undang-undang yang membentuk pengadilan niaga, Undang-undang Bea Cukai, Undang-undang tentang penetapan harga dan persaingan bebas, pengaturan pasar Negara, dan Undang-undang tentang perlindungan properti industri dan komersial (Yatri, 2020).

Maroko dapat memperoleh keuntungan finansial dari hubungan yang lebih dekat dengan Israel dalam hal perdagangan dan investasi, serta di sektor-sektor utama seperti teknologi, air, energi, dan pertanian. Normalisasi parsial juga dapat meningkatkan pendapatan pariwisata Maroko, yang telah berkurang akibat pandemi global, karena berpotensi mendorong lebih banyak orang Israel untuk mengunjungi kerajaan tersebut. Beberapa memperkirakan jumlah tahunan turis Israel ke Maroko meningkat dari sekitar 50.000 menjadi 200.000. Perdagangan tahunan dapat meningkat sebesar \$500 juta (Abouzzohour, 2021)

Bagi Israel, memperkuat hubungan ekonomi dengan Maroko dapat membuka pintu gerbang ke Afrika, terutama ke negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, dengan mengandalkan pengalaman dan infrastruktur Maroko. Dalam beberapa tahun terakhir, Maroko telah mengembangkan infrastruktur keuangan dan bisnis di Afrika Sub-Sahara, terutama di negara-negara berbahasa Prancis di Afrika Barat dan Tengah, tempat bank-bank Maroko aktif, dan di mana konektivitas lalu lintas antara negara-negara ini dan Maroko sangat berkembang. Selain potensi ekonomi berupa ekspor ke pasar yang saat ini tidak dapat diakses oleh Israel, pembukaan pintu gerbang ke Afrika Barat dan Tengah juga memiliki potensi politik berupa penguatan hubungan dengan negara-negara Afrika (Spira, 2022)

### ***Promotion of Values***

Meskipun normalisasi baru terjadi pada tahun 2020, Maroko mungkin tanpa disadari telah membuka jalan untuk itu bertahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Maroko dan Israel telah melakukan upaya keras mereka normalisasi dalam sejarah bersama dan arus populasi. Bagian dari alasan Maroko untuk menormalisasi hubungan dengan Israel didasarkan pada sejarah Yahudi. Negara ini telah menopang hubungannya dengan orang-orang Yahudi keturunan Maroko, disana diperkirakan ada sekitar 1 juta orang Yahudi yang berasal dari Maroko atau keturunan Maroko dengan menghidupkan kembali narasi sejarah yang melemah atau hilang selama beberapa dekade. Merehabilitasi bagian dari sejarah Maroko ini telah menjadi elemen dari yang lebih luas dari upaya nasional yang mendahului normalisasi untuk membangun kembali dan masyarakat yang toleran secara agama di bawah monarki inklusif yang memerintah semua umat beragama, termasuk Muslim, Kristen dan Yahudi. (Maroc, 2022)

Upaya untuk menunjukkan koeksistensi antara Muslim dan Yahudi berubah menjadi perayaan sejarah Yahudi di negara itu sebagai sebagai contoh dari toleransi tersebut. Menggambar kontribusi dan pentingnya populasi Yahudi di berbagai berbagai bidang telah memberikan langkah awal yang alami untuk normalisasi dari sudut pandang kepemimpinan. Secara historis, Populasi Yahudi Maroko adalah minoritas, terhitung kurang dari 10% dari total populasi pada puncaknya. Ada terjadi eksodus besar-besaran setelah Perang Dunia II dan pada periode pasca kemerdekaan, ketika komunitas Yahudi dari seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara berbondong-bondong ke Israel. Maroko adalah salah satu titik keberangkatan utama, dengan perkiraan 130.000 orang Yahudi meninggalkan negara itu dari akhir 1940-an hingga awal 1960-an. Berbagai faktor berperan dalam eksodus ini, di luar pendirian Israel sebagai tanah air Yahudi, termasuk insiden kekerasan anti-Yahudi dan kekhawatiran yang lebih luas yang lebih luas dan kekhawatiran dalam komunitas Yahudi tentang masa depan mereka di negara tersebut setelah kemerdekaan. Pada tahun 1948, pogrom di Oujda dan Jerada memicu eksodus Yahudi dari Maroko.

### ***Favorable world order***

Maroko ingin memperkuat posisi regional di Afrika Utara memiliki niat Selain itu, dalam Favorable World Order Maroko berupaya untuk menciptakan kawasan yang aman, kondusif serta memiliki stabilitas yang baik. Normalisasi dengan Israel merupakan keuntungan geopolitik Maroko. Pertama, sebagai imbalan atas normalisasi, Maroko mendapatkan pengakuan AS atas kedaulatannya atas wilayah "Sahara Barat". Memang, Amerika Serikat juga memiliki kepentingan untuk membuka konsulat di Dakhla, salah satu kota Sahara Barat, sebuah

langkah yang tidak mungkin diambil tanpa normalisasi hubungan. Kedua, berkat pengakuan Amerika, Maroko mendapatkan keunggulan secara geopolitik melawan Aljazair dan Iran yang mendukung front Polisario. Ketiga, normalisasi membuka jalan bagi bantuan Israel untuk mendukung tentara Maroko. Keempat, hubungan Maroko dengan UEA dan Bahrain, yang memburuk karena masalah Yaman dan Qatar, diperkirakan akan membaik. Terlebih lagi, kesepakatan tersebut akan mengamankan aliran dukungan politik dan ekonomi dari negara-negara teluk Arab yang dibutuhkan Maroko dan yang akan membantu Maroko untuk mengurangi ketergantungan ekonominya pada Turki dan Qatar (Seddik, 2021)

Hubungan trilateral antara Rabat, Washington, dan Tel Aviv dapat memperkuat posisi regional Maroko di Afrika Utara, terutama dalam persaingan politik dan strategis dengan Aljazair. Sebelum meninggalkan jabatannya pada bulan Januari, Pemerintahan Trump mengusulkan penjualan senjata senilai \$1 miliar ke Maroko, termasuk empat drone MQ-9 Reaper berkemampuan senjata bersama dengan amunisi berpemandu laser. Itu juga berjanji untuk membuka konsulat di Dakhla undangan yang jelas ke negara lain untuk mendirikan konsulat mereka sendiri di wilayah tersebut, sehingga membantu Maroko dalam menegaskan kedaulatannya (Al-Anani., 2021)

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya normalisasi antara Maroko dan Israel, untuk mengkaji kepentingan Maroko dalam normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel dan juga mengetahui peran Amerika Serikat dalam normalisasi Maroko dan Israel. Maroko dan Israel

sebelumnya tidak memiliki hubungan diplomatik dimana hal ini membuat hubungan politik dan ekonomi tidak berkembang. Secara internal, Maroko memiliki masalah utama terkait dengan Sahara Barat yang menjadi ganjalan utama dalam hubungan internasional atau diplomasi dari Maroko.

Dari hasil analisis, faktor utama yang mendorong normalisasi ini adalah terkait dengan konflik Sahara Barat, dimana dengan adanya normalisasi ini AS memberikan tiga insentif atau imbalan kepada Maroko agar kesepakatan normalisasi tercapai, yakni: adanya perjanjian pemberian insentif berupa pengakuan kedaulatan atas wilayah Sahara Barat, pemberian dana investasi dan juga penjualan peralatan militer modern. Maroko perlu mendapatkan dukungan politik untuk kepentingan Maroko atas Sahara Barat dan juga terkait masalah Polisario. Maroko perlu mendapatkan dukungan dari negara kuat seperti Amerika Serikat agar posisinya unggul secara politik dibandingkan dengan kepentingan negara lainnya terkait Sahara Barat. Dengan adanya kesepakatan normalisasi hubungan antara Maroko dan Israel juga memperkuat posisi Maroko di kawasan khususnya terkait permasalahan Sahara Barat dan Polisario.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Holsti, K. J. (1987). *Politik Internasional : Suatu Kerangka Analisis*, Jakarta : Pedomam Ilmu Jaya.

J, M. L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Nasution, S. (1996). *Metode Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.

Neuchterlein, D. (1983). *ational Interests and National Strategy*,” in Terry L Heyns, ed., “*Understanding U.S. Strategy: A Reader*”, Washington, DC: National Defense University.

Sugiyono. (2014). *Cara Mudah Menyusun Skripsi: Skripsi, Tesis dan Disertasi*.

Bandung: Alfabeta.

Waltz, K. (1988). *The Origins of War in International Theory*, *Journal of Interdisciplinary History*.

Waltz, S. M. (1987). *The Origins of Alliances*.

### **Internet**

Abouzzohour, Y. (2021, Agustus 10). *Partial Normalization: Morocco's Balancing Act*. Retrieved from Arab Reform Initiative: <https://www.arab-reform.net/publication/partial-normalization-moroccos-balancing-act/>

Al-Anani., K. d. (2021). *Moroccan Normalization With Israel : Temporary Deals or Permanent Peace*. Retrieved from Arab Center Washington DC: <https://arabcenterdc.org/resource/moroccan-normalization-with-israeltemporary-deal-or-permanent-peace/>

BBC News. (2020, Desember 11). *Maroko jadi negara keempat di kawasan Arab yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, apa dampaknya bagi wilayah sengketa Sahara Barat?* Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55255487>

Maroc. (2022, Agustus 22). *Mohammed VI appelle les Juifs marocains à investir au Maroc*. Retrieved from Bladi.net: <https://www.bladi.net/mohammed-6-appel-juifs-marocains,95812.html>

Spira, I. (2022, September 29). *Israel and Morocco sign bilateral agreement for energy cooperation*. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs: <https://www.gov.il/en/pages/israel-morocco-bilateral-energy-cooperation-agreement-29-sep-2022>

Trump, D. J. (2020, Desember 11). *President Donald J. Trump Has Brokered Peace Between Israel and the Kingdom of Morocco*. Retrieved from The White House: Gencatan senjata antara Maroko dan Front Polisario terjadi pada tahun 1991 dan berlangsung selama 29 tahun hingga tahun 2020. Pada bulan November 2020, tepat sebelum <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-broker>



Welle, D. (2020, Desember 12). *Giliran Maroko Sepakati Normalisasi Hubungan dengan Israel*. Retrieved from Republika: <https://internasional.republika.co.id/berita/ql6eve9815000/giliran-maroko-sepakati-normalisasi-hubungan-dengan-israel>

### **Jurnal**

Adwitama, A. (2022). Peran Maroko Dalam Mempertahankan Wilayah Sahara Barat. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*.

Fakir, I. (2022). Morocco And Israel. Economic Opportunity, and Moral Hazard. *Middle East Institute*.

Paksi, I. d. (2022). ransaksionalisme Amerika Serika Dalam Normalisasi Hubungan Maroko-Israel. *Jurnal Pemikiran Politik Islam*.

Seddik, D. A. (2021). Geopolitics of the Arab-Israel Normalization of Relation. *Journal of Afro-Asian Studies*.

Ulum, M. B. (2021). Pro-Kontra Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel- Sudan. *Antara Kepentingan Nasional Dengan Solidaritas Pembebasan Palestina*.